

## MAKNA TERSELUBUNG PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: ANALISIS WACANA KRITIS\*

*D. Jupriono\*\**

*Sudarwati\*\**

*Anik Cahyaning Rahayu\*\**

*Ambar Andayani\*\**

**Abstract.** The focus of this research is the semantic aspect in the form of various implied meaning of the text of the state address of President Susilo Bambang Yudhoyono during his reign of 2004-2008. In the perspective of critical discourse analysis, it can be shown five implied meanings as follows: to answer the demands of the public, garnering support from many circles, building optimism to the people, boost self-image in the public eye, and muffled criticism of the political opponent / rival. In his state address, it is discovered that SBY discredited his political rival groups impliedly.

Key words: semantic, textual meanings, hidden meanings, critical discourse analysis

### **Pendahuluan**

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkenal sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) yang amat menjaga citra diri (*self image*) di hadapan publik, khususnya media massa. Istilah "politik pencitraan", misalnya, populer ditujukan kepada tokoh kelahiran Pacitan ini. Dua pesaingnya, Megawati Soekarnoputri dan Amien Rais, pernah memperoloknya sebagai presiden yang kelewat sibuk melancarkan "tebar pesona" dan "caper" (cari perhatian).

Mega dan Amien benar. Bagaimana Gus Dur? Memang, dari semua presiden RI, Gus Durlah presiden yang paling tidak peduli akan "politik pencitraan". Akan tetapi, bukan hanya SBY presiden pengelola citra diri. Semua presiden siapa pun dan di mana pun selalu berbuat serupa. (Duffy, 2003; Edelman, 2008). Derajat intensitasnyalah yang berbeda.

Pernyataan seorang presiden selalu bernilai di mata publik, apakah untuk dipuji atau pun dikritik. Iaa merepresentasikan bukan saja siapa diri presiden, tetapi juga bagaimana kebijakan nasional dalam bidang politik, ekonomi, hankam, ideologis, dan sosial budaya kabinet pemerintahannya. Pernyataan presiden selalu menimbulkan pengaruh, setidaknya perhatian publik. Bagi yang bersangkutan (dan seluruh penghuni gerbong kabinetnya), pernyataan presiden—misalnya lewat pidato kenegaraan—selalu

---

\* Artikel ini dipetik-kembangkan dari hasil riset Tim Peneliti: D. Jupriono (ketua), Anik C. Rahayu, Sudarwati, Ambar Andayani, "Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis", *Laporan Hasil Penelitian Dosen Muda Tahun Anggaran 2009*, Bab 5, khususnya 5.1.4 (hal. 54—65), didanai DP2M, Ditjen Dikti, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2009.

\*\* D. Jupriono, M.Si., Dra. Sudarwati, M.Si., Dra. Anik C. Rahayu, M.Pd., Ambar Andayani J., S.S., M.Pd., adalah dosen-dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya

bernilai amat strategis-politis sebab lewat itulah bisa dibangun citra diri serbapositif dan bisa juga dimanfaatkan untuk mencitrakan para pesaingnya secara serbanegatif. (Anderson, 1990; cf. Nimmo, 2000).

Cukup banyak kajian terhadap bahasa presiden-presiden RI. Bahasa politik Soekarno pernah diteliti oleh Anderson (1990); pernyataan harian dan bahasa pidato kenegaraan Soeharto pernah dikaji oleh van Langenberg (1990); pernyataan politis dan komentar Habibie di media massa pernah diteliti oleh Muslich (2001); pernyataan kontroversial Gus Dur sudah dikaji oleh Tim Incres (2000) dan Jupriono (2009); tema, makna, dan gaya retorika pidato Megawati dikaji oleh Jupriono (2004). (Jupriono et al., 2009). Sepengetahuan penulis, belum satu pun penelitian tentang bahasa atau pidato Presiden SBY.

Dalam penelitian ini pidato kenegaraan Presiden SBY diangkat sebagai fokus kajian dengan dua pertimbangan. Pertama, kajian terhadap aspek bahasa pidato kenegaraan SBY memang belum pernah dilakukan. Kedua, penelitian terhadap bahasa para pemimpin (tidak hanya presiden) di Indonesia lazimnya menggunakan perspektif analisis wacana deskriptif atau lebih lazim disebut analisis wacana (*discourse analysis*) saja, sedangkan perspektif analisis wacana kritis (AWK, *critical discourse analysis*)—sebagai perkembangan lebih lanjut dari analisis wacana—masih langka (van Dijk, 2002).

Penelitian terhadap pidato kenegaraan berarti pengkajian terhadap bahasa, pilihan kata, bentuk kalimat, gaya bertutur, serta struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn, 1996: 85). Sebagai kajian yang menggunakan aspek bahasa, AWK tidak dapat melepaskan diri dari pemakaian kaidah berbagai cabang linguistik, seperti semantik, sintaksis, dan morfologi. AWK menyerap kontribusi studi linguistik. Hanya saja—tidak seperti linguistik deskriptif yang cukup berhenti pada aspek tekstual—AWK menitik lebih dalam pada konteks dan produksi bahasa suatu teks. Dengan kata lain, AWK tidak hanya mempersoalkan aspek kebahasaan, tetapi juga bagaimana bahasa diproduksi dan misi ideologi di baliknya (Fairclough, 1995; van Dijk, 1998).

Dalam penelitian ini AWK yang dipakai adalah kerangka analisis yang ditawarkan oleh van Dijk (1998). Kerangka tersebut memeringkatkan wacana sebagai konstruksi pesan yang terdiri atas tiga struktur tingkatan, yakni makrostruktur, superstruktur, dan mikrostruktur. Makna tekstual dan makna terselubung suatu wacana, misalnya, masuk ke dalam ruang lingkup mikrostruktur, yang dapat ditemukan melalui analisis terhadap kata, frase, anak kalimat, kalimat, proposisi, teks wacana (van Dijk, 1998).

Fokus kajian tulisan ini adalah makna terselubung di balik teks pidato kenegaraan SBY. Dengan makna (sebagai elemen semantis), seorang yang menyajikan wacana/teks mengharapkan sesuatu kepada pembaca/pendengarnya. Dalam konteks pidato kenegaraan, tampilan teks pidato dapat saja, misalnya, memiliki makna: menjawab tuntutan, menggalang dukungan, membangun optimisme, mendongkrak citra, meredam kritik, dan bahkan memojokkan orang atau kelompok lain sebagai lawan politiknya.

## Metode

Kajian ini berada dalam ruang lingkup wacana (*discourse*), yang berfokus pada elemen semantis wacana, dari perspektif analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) versi van Dijk (1998; 2002). Sumber data penelitian ini adalah teks pidato

kenegaraan Presiden SBY menjelang Proklamasi Kemerdekaan kurun 2004—2008. Instrumen penelitian adalah instrumen kreatif, yakni peneliti sendiri sebagai *human instrument* (Mulyana, 2001).

Berdasarkan sumber datanya, data diambil dengan teknik dokumentasi berupa teks-teks pidato. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) (Bungin, 2001) dengan perspektif analisis wacana kritis melalui tahap-tahap: (1) membaca teks hingga memperoleh pemahaman total atas makna tekstual, (2) menentukan rincian makna-makna tekstual, dan (3) menafsirkan aneka makna terselubung di balik teks.

### **Hasil & Pembahasan**

Terdapat lima macam makna terselubung di balik makna tekstual dalam pidato kenegaraan SBY kurun 2004—2008, yaitu: (1) menjawab tuntutan publik, (2) menggalang dukungan dari banyak kalangan, (3) membangun optimisme kepada rakyat, (4) mendongkrak citra diri di mata publik, dan (5) meredam kritik dari para lawan/pesaing politis.

### **Menjawab Tuntutan**

Kutipan-kutipan (1—5) dari teks pidato 2004—2008 berikut ini, maksudnya ditafsirkan sebagai strategi untuk menjawab tuntutan.

- 1) Pemerintahan akan mencurahkan perhatian untuk menata masalah dalam negeri. Pemerintahan akan menstimulasi kehidupan ekonomi, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, yang dapat menyerap tenaga kerja dan membantu mengentaskan kemiskinan. Pemerintahan akan terus menjalankan kebijakan ekonomi terbuka ... Pemerintah akan terus meningkatkan produktifitas dan daya saing. Pemerintahan akan menggalakkan investasi. Pemerintahan secara aktif akan melancarkan program pemberantasan korupsi, yang akan saya pimpin sendiri; ... akan memberi perhatian khusus terhadap penanganan situasi konflik di Aceh dan Papua; ... akan memprioritaskan dan menata kebijakan Pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan; ... akan melakukan dialog intensif dan konstruktif dengan pelaku-pelaku ekonomi.... akan memberikan perhatian khusus pada desentralisasi dan otonomi daerah ... akan berusaha keras membentuk Pemerintah yang bersih dan baik (*good governance*) (Pidato, 20-10-2004)
- 2) Sejak awal, Pemerintah telah bertekad memerangi korupsi. ... Mengambil pelajaran dari masa lalu, kita harus benar-benar tegas dan konsisten dalam memberantas korupsi. ... 9 Desember 2004, saya telah mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan Inpres No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah disusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009. ... saya telah membentuk Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2 Mei 2005 yang lalu. ... Oktober 2004 sampai April 2005, kejaksan telah melimpahkan 233 perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan. Timtas Tipikor kini tengah menyidik 7 kasus dugaan korupsi. Sementara, sampai minggu kedua bulan Agustus ini, KPK menangani 27 kasus/perkara tindak pidana korupsi (Pidato, 16-08-2005)
- 3) Pemerintah akan terus menyempurnakan sistem perlindungan bagi keluarga miskin. ... sejak 2005, kita telah berhasil memperkenalkan program seperti sistem asuransi kesehatan untuk rumah tangga miskin dan Subsidi Langsung Tunai (SLT), BOS, dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2007, seperti BLT Bersyarat untuk menunjang perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, dan program padat karya di tingkat desa. (Pidato, 16-08-2006)
- 4) ... kita terus melakukan percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Menandai keseriusan Pemerintah ... saya telah mengeluarkan Inpres Nomor 5

Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Prioritas pembangunan ini terutama ditujukan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial, serta kebijakan khusus bagi putra-putri Papua. (Pidato 16-08-2007)

- 5) Pada klaster pertama, kita berikan bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga kurang mampu ... melalui penyediaan Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana Alam, Bantuan Langsung Tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, dan Beasiswa, Pada klaster kedua, kita gulirkan program yang diwadahi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri... Pada klaster ketiga, kita tingkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ... Hingga 31 Juli 2008, telah direalisasikan KUR Rp. 8,9 triliun, dengan dari 950 ribu debitur (Pidato, 15-08-2008)

Makna terselubung menjawab tuntutan selalu konkret, terukur. Meskipun demikian, kadar kekonkretannya berbeda-beda. Pada 2004 strategi menjawab tuntutan memiliki kadar kekonkretan rendah, bahkan paling rendah di sepanjang masa pemerintahan SBY. *Pemerintah akan terus meningkatkan produktifitas dan daya saing*, misalnya, mengandung kata *akan*, lebih bersifat rencana program dan belum bernilai implementasi. Harap dimaklumi, saat itu SBY baru saja dilantik. Jadi, mustahil dituntut menjawab apa saja yang sudah dilakukan. Karena bernilai rencana, belum dapat diukur bagaimana caranya, bagaimana mekanisme pelaksanaannya, langkah apa saja yang dilakukan, bagaimana monitor dan evaluasi dilakukan, dst.; semuanya masih berada pada tataran *akan*.

Pada teks pidato 2005 kerja SBY sebagai jawaban terhadap tuntutan rakyat sudah dapat diukur. Misalnya, dikatakan *kejaksanaan telah melimpahkan 233 perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan .... Timtas Tipikor tengah menyidik 7 kasus... KPK menangani 27 kasus/perkara*. Jejak kerja kejaksanaan, Timtas Tipikor, dan KPK adalah jawaban konkret terhadap tuntutan semua pihak untuk memberantas korupsi. Penggunaan angka-angka konkret seperti ini memperlihatkan keterukuran kinerja. Strategi menjawab tuntutan sebagai maksud teks pidato SBY 2006 tampak jelas pada kata-kata berikut: *asuransi kesehatan untuk rumah tangga miskin, dan Subsidi Langsung Tunai (SLT), BOS, pembangunan infrastruktur perdesaan, BLT Bersyarat, dan program padat karya*. Semua ini adalah jawaban konkret yang memiliki keterukuran meskipun kadar keterukurannya leboh lanjut masih dapat dipersoalkan.

Pada pidato 2007 terdapat bagian teks *pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah potensial*. Ini merupakan hal konkret pemerintah dalam menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat kecil Papua. Bahwa kadar keterukurannya labih lanjut masih bisa dipersoalkan—itu tidak disangkal. Di sini ditekankan "ada tidaknya" program konkret di lapangan.

Lebih konkret dari pidato 2007, pidato 2008 menampilkan banyak fakta yang jauh lebih konkret dan tentu saja terukur. Misalnya: *Raskin, PKH, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, BOS, Bantuan bagi Lanjut Usia dan Cacat Ganda terlantar, Bantuan Bencana Alam, BLT, PNPM Mandiri, pemberdayaan UMKM, realisasi KUR Rp. 8,9 triliun untuk debitur lebih dari 950 ribu orang di seluruh tanah air*. Program-

program konkret ini benar-benar relevan sebagai strategi untuk menjawab tuntutan rakyat.

Pemakaian data kuantitatif berupa angka-angka pendukung fakta adalah lazim dalam pidato kenegaraan. Ini dimanfaatkan sebagai strategi pencitraan keberhasilan pemerintahan. Strategi ini disebut penalaran teknis (*technical reasoning*) (Duffy, 2003).

### **Menggalang Dukungan**

Kutipan-kutipan (6—10) dari teks pidato 2004—2008 berikut ini, maksudnya ditafsirkan sebagai strategi untuk menggalang dukungan.

- 6) Kini saatnya kita memusatkan tekad, semangat, pikiran, untuk mengatasi berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi rakyat, bangsa, dan negara kita. ... pemerintah yang saya pimpin tidak mungkin bisa mengatasi tantangan dan persoalan bangsa ini, tanpa dukungan dan partisipasi rakyat, serta seluruh komponen bangsa. (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 20 Oktober 2004)
- 7) Terhadap pelaksanaan RPJM Nasional, saya mengharapkan dukungan dari lembaga-lembaga negara. Posisi paling depan sebagai mitra kerja Pemerintah adalah DPR dan juga DPD. (Pidato, 16-08-2005)
- 8) Pada akhirnya, pelaksanaan APBN dan tujuan pembangunan umumnya, tidak mungkin mencapai sasaran tanpa partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi. (Pidato, 16-08-2006)
- 9) ... saya mengajak DPR, DPD, MA, MK, dan lembaga negara lainnya untuk bersinergi satu sama lain secara lebih solid ... Pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama lebih baik. (Pidato, 16-08-2007)
- 10) ... saya mengajak kepada segenap komponen bangsa, marilah di hari ulang tahun Proklamasi kita yang ke-63 ini, dan ke depan, kita bangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara sehat, dan menjalin hubungan kelembagaan lebih erat lagi. ... saya mengajak MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, dan lembaga negara lainnya untuk bersinergi membangun bangsa. (Pidato, 15-08-2008)

Seperti diatur, dalam lima tahun masa pemerintahannya, SBY membuka pada 2004 dengan meminta *dukungan dan partisipasi rakyat, serta seluruh komponen bangsa* dan menutup pada 2008 dengan *mengajak kepada segenap komponen bangsa*, sebagai upaya untuk menggalang dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Sementara, dalam pidato 2005, 2006, dan 2007, dukungan diminta kepada pihak-pihak yang lebih khusus. Misalnya, pada 2005 SBY meminta dukungan khusus kepada DPR dan DPD sebagai mitra kerja pemerintah. Pihak yang dimintai dukungan pada 2006 adalah pelaku ekonomi (UMKM, pengusaha, konglomerat). DPR, DPD, MA, MK, dan lembaga negara lain, adalah pihak-pihak khusus yang disebut eksplisit dalam teks pidato 2007, yang darinya akan digalang dukungan.

Permintaan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia ada di semua teks pidato 2004—2008. Permintaan tersebut selalu berada di bagian akhir. Kebiasaan ini sama dengan kebiasaan kelima presiden RI terdahulu (Jupriyono, 2004). Menggalang dukungan selalu bernilai politis. Dengan ini dibangun citra pemimpin sebagai pemersatu, penggalang solidaritas, yang merangkul semua elemen (Edelman, 2008).

### **Menumbuhkan Optimisme**

Berikut ini adalah kutipan-kutipan (11—15) dari teks pidato 2004—2008 yang maksudnya ditafsirkan sebagai strategi untuk menumbuhkan optimisme.

- 11) ... tekad dan itikad baik kita jauh lebih unggul dari permasalahan yang kita hadapi. Di sinilah watak dan ketangguhan kita sebagai bangsa besar sedang diuji. ... semakin berat ujian yang membebaninya akan semakin tinggi ketangguhannya; Mari kita buktikan kebesaran kita sebagai bangsa. (Pidato, 20-10-2004)
- 12) .... Atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah, selama 60 tahun ini negara kita tetap tegak berdiri, di tengah ujian yang datang silih berganti. 60 tahun perjalanan bangsa, memang masih jauh dari cita-cita para pendiri. Namun, pengalaman suka duka membangun negara selama 60 tahun ini, cukup menjadi bekal bagi kita, untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan bersama. (Pidato 16-08-2005)
- 13) Tahun-tahun yang tengah kita arungi penuh tantangan. Tetapi, dengan ridho Allah SWT, ... kita semua, ... akan mampu mengubah masa depan kita ... Marilah kita tetap tegar, percaya diri, dan bekerja lebih keras lagi ... Di depan kita, tersedia banyak kesempatan dan peluang (Pidato, 16-08-2006)
- 14) Meskipun perjalanan bangsa ini tidak selalu mulus dan mudah, ... arah yang kita tempuh sudahlah benar. .... Kita juga harus meyakini keadaan kita semakin hari semakin membaik .... (Pidato, 16-08-2007)
- 15) Inilah masanya kita mengubah mentalitas mudah menyerah menjadi semangat yang berorientasi pada peluang. Saya sungguh yakin setiap masalah selalu mengandung peluang, selalu ada jalan keluarnya. Percayalah, masalah yang kita hadapi dewasa ini juga dihadapi bangsa lain. Sejarahlah yang kelak akan membedakan antara mereka yang hanya bisa meratapi nasib, dan mereka yang tak pernah menyerah mencari solusi. Sejarah kebangkitan dan perubahan Indonesia, dari 1908, 1928, 1945, sampai 1998, semuanya diukir oleh pejuang-pejuang *bermental Harus Bisa!* Apa pun masalahnya, kapan pun masanya, seberapa pun keterbatasannya, kalau kita *bermental BISA*, kita semua *BISA*, dan Indonesia *pasti BISA!*  
(Pidato Kenegaraan Presiden RI, 15 Agustus 2008)

SBY membangun optimisme dengan variasi dalam dinamika sepanjang 2004—2008. Pada awal pemerintahannya (2004) SBY menegaskan bahwa "semakin berat ujian yang membebaninya, akan semakin tinggi ketangguhannya". Tahun kedua (2005) SBY optimis bahwa "pengalaman 60 tahun menjadi bekal menghadapi dan menyelesaikan tantangan bersama". Pada 2006 SBY yakin bahwa "mampu mengubah nasib dan masa depan kita ke arah yang lebih baik karena di depan kita, tersedia banyak kesempatan dan peluang". Pidato 2007 SBY optimis bahwa "arah yang kita tempuh sudahlah benar". Pada penghujung masa pemerintahannya, 2008, SBY mengeluarkan seruan yang lalu menjadi ikon tim sukses kampanyenya, yaitu "*bermental Harus Bisa!* kita semua *BISA*, dan Indonesia *pasti BISA!*"

"Harus bisa!" seakan menjadi ikon SBY. "Harus bisa!" selanjutnya identik dengan SBY: "Harus bisa!" itu SBY dan SBY itu "Harus bisa!". Seluruh variasi optimisme SBY dari 2004—2007, kalau dicari benang merahnya, akan berujung pada titik simpul "Harus bisa!". Staf Khusus Presiden SBY, Dino Patti Djalal (2008: 255), menegaskan bahwa "harus bisa" adalah seni memimpin *à la* SBY istimewa di saat-saat menghadapi masalah-masalah berat (peperangan, bencana, konflik, tekanan krisis, dst.). Setiap pemimpin, menurut SBY, harus *bermental "harus bisa"*—dengan kata lain, harus memiliki spirit optimisme. Mungkin bukan kebetulan bahwa buku Djalal diberi judul *Harus Bisa! Seni Memimpin à la SBY* (2008).

### ***Mendongkrak Citra***

Berikut ini adalah kutipan-kutipan (16—20) dari teks pidato 2004—2008 yang maksudnya ditafsirkan sebagai strategi untuk mendongkrak citra dirinya sebagai pemimpin yang sederhana, merakyat, terbuka, berhasil, dan peduli pada nasib rakyat.

- 16) Walaupun kini telah menjadi Presiden, saya tidak berbeda dari saudara semuanya: saya hanyalah warga biasa dari keluarga biasa ... Dengan mandat yang saya terima langsung dari saudara, saya bertekad bukan saja untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, namun juga menjadi Presiden Seluruh Rakyat Indonesia. ... Pikiran, tenaga dan waktu yang saya miliki, akan saya dedikasikan untuk memajukan dan melindungi setiap insan Indonesia. (Pidato  
*Kenegaraan Presiden RI*, 20 Oktober 2004)
- 17) Kami selalu berupaya berkonsultasi dan menyampaikan kebijakan yang akan diambil ke segenap pihak, baik kalangan pemerintahan antara lain melalui konsultasi secara berkala dengan para gubernur atau dengan DPR, maupun langsung berdialog dengan masyarakat. (Pidato *Presiden RI*,  
16-8-2005)
- 18) Ungkapan rasa hormat yang dalam, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya ... yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. B.J. Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekamoputri, ... Ungkapan serupa saya sampaikan pula kepada para Perdana Menteri Republik Indonesia—PM Sutan Sjahrir dan PM Djuanda ... (Pidato *Presiden RI*, 16  
Agustus 2006)
- 19) Perubahan UU PPh, perubahan UU PPN dan PPnBM, RUU Pajak dan Retribusi Daerah saat ini masih dalam pembahasan. Tentu saya sangat berharap, agar ketiga RUU itu dapat juga diselesaikan dalam waktu yang cukup singkat, sehingga memberikan kepastian dan perbaikan dalam lingkungan usaha. (Pidato *Kenegaraan Presiden RI*,  
16 Agustus 2007)
- 20) .... pada tahun ini kita kembali mencapai swasembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa Orde Baru, produksi beras nasional lebih tinggi daripada konsumsi beras kita. Itulah sebabnya, juga untuk pertama kali sejak masa Orde Baru, harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras internasional. (Pidato *Kenegaraan Presiden RI*,  
15 Agustus 2008)

Citra diri (*self image*) seperti apakah yang hendak diciptakan SBY di mata publik? Ada bermacam citra diri—tentu saja semuanya positif—yang merambat cukup dinamis.

Pada pidato 2004 SBY menghendaki citri dirinya sebagai presiden yang merakyat, populis, dekat dengan rakyat. Misalnya, kepada publik rakyat Indonesia, SBY menyatakan bahwa dirinya "tidak berbeda dari saudara semuanya". SBY ingin memperlihatkan kepada publik bahwa dirinya "hanyalah warga biasa yang lahir dari keluarga biasa". Ungkapan ini berdaya pikat luar biasa, memiliki magnet tinggi. Citra populisnya adalah SBY sama dengan rakyat. Maka, mengkritik SBY sama dengan mengkritik rakyat; menentang SBY, dengan demikian, identik dengan menentang rakyat. Sebagai strategi pencitraan, ini cara cerdas, sekaligus licik (Edelman, 2008; cf. Stewart, 2005).

Citra diri di mata publik sebagai pemimpin yang mau mendengar pihak lain dan terbuka diberi masukan siapa pun hendak ditampilkan SBY dalam teks pidato 2005. SBY menyatakan secara eksplisit bahwa ia "selalu berupaya untuk berkonsultasi ke

segenap pihak, gubernur, DPR, berdialog dengan masyarakat”. Dialog itu dilakukan SBY saat menyusun program-program pembangunan. Program-program SBY disusun setelah menerima kasukan dari berbagai pihak—setidaknya itulah citra diri yang hendak ditumbuhkan SBY. Dengan demikian, semua pihak mesti mendukung—jangan menghambat, apalagi menggagalkan. Sebab—seperti diharapkan SBY—rakyat tahu tidak mendukung program SBY berarti tidak mendukung kehendak semua pihak, aspirasi rakyat Indonesia.

Pidato 2006 lain lagi. Berbeda dengan Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati, SBY adalah satu-satunya presiden RI yang memberikan penghormatan secara eksplisit kepada dua Perdana Menteri Republik Indonesia yang pernah ada: Sutan Sjahrir dan Djuanda. Kalau menyebut para pahlawan dan menyebut semua nama presiden terdahulu, itu biasa—itu yang dilakukan presiden-presiden sebelum SBY. Maka, meskipun hanya menyebut nama (kedua PM), itu terasa luar biasa, lain dari yang lain, sadar sejarah, dan tulus—bukan formalitas basa-basi.

Citra diri berikutnya yang hendak dibangun SBY di mata publik melalui pidato 2007 adalah citra yang ”nakal”. Dikatakan nakal sebab SBY membangun citra diri positif di atas citra diri negatif pihak lain (DPR). Sebagai presiden, SBY berharap Perubahan UU PPh, perubahan UU PPN dan PPnBM, RUU Pajak dan Retribusi Daerah segera tuntas. Untuk itu, tugas berikutnya ada di pundak DPR. Maka, jika terjadi kelambatan atau berlarut-larutnya pembahasan undang-undang itu, mungkin saja kalangan usaha langsung memvonis bahwa itu kesalahan DPR, bukan Presiden SBY. Tuntasnya pembahasan UU tersebut ditunggu para pelaku usaha di tanah air sebab akan memberikan ”kepastian dan perbaikan dalam lingkungan usaha”.

Pada pidato 2008, citra diri yang hendak ditumbuhkan adalah SBY sukses. Dinyatakan SBY, sejak Orde Baru jatuh (1998), baru pada pemerintahannya, swasembada beras berhasil diwujudkan serta harga beras di dalam negeri lebih rendah daripada harga beras internasional. Dua prestasi gemilang sekaligus ditorehkan SBY. Soeharto pun hanya berhasil dalam satu hal, yaitu swasembada beras. Ini juga strategi ”memuji diri dengan malu-malu” dan ini biasa dalam komunikasi politis (Sigelman, & Miller, 2003).

### ***Meredam Kritik***

Berikut ini adalah kutipan-kutipan (21—25) dari teks pidato 2004—2008 yang maksudnya ditafsirkan sebagai strategi untuk meredam kritik.

- 21) Saya mengingatkan: segala persoalan bangsa yang rumit ini tidak mungkin diselesaikan hanya dalam 100 hari. Tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi, saya yakin bahwa tekad dan itikad baik kita jauh lebih unggul dari permasalahan yang dihadapi. (*Pidato Presiden RI, 20 Oktober 2004*)
- 22) Momentum pertumbuhan ini cukup membesarkan hati. Namun perlu kita jaga secara hati-hati karena lingkungan perekonomian global terus berubah secara cepat dan tidak ramah. Ketidakseimbangan perekonomian global telah menyebabkan gejolak nilai tukar antarnegara yang berdampak ke Indonesia. Tingkat suku bunga internasional cenderung meningkat, juga harga minyak mentah dunia yang melonjak tinggi  
(*Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2005*)
- 23) Dengan murahnya harga obat, kita berharap, rakyat akan makin mampu membelinya. Pencantuman harga juga merupakan upaya menjamin agar harga obat tidak dipermainkan para spekulan. Pemerintah akan terus berupaya, meningkatkan pelayanan kesehatan, guna menjangkau seluruh

lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan kesehatan, termasuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu juga mulai diaktifkan kembali. Jumlah Posyandu yang telah berhasil diaktifkan kembali, kini telah mencapai 42.221 unit di seluruh tanah air (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2006)

- 24) Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di berbagai jenjang, terus kita lakukan. Adapun untuk pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar, sudah sepenuhnya diserahkan kepada daerah dengan bantuan dari APBN melalui Dana Alokasi Khusus. (Pidato Presiden 16-08-2007)
- 25) ... semakin besar anggaran transfer ke daerah dalam tahun 2009 ... sejalan dengan semangat otonomi daerah, saya berharap para pimpinan daerah dapat betul-betul memanfaatkan setiap rupiah dana yang diperoleh, untuk dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat. Pimpinan daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan penyerapan pengangguran. (Pidato 15 Agustus 2008)

Soal kritik senantiasa berhubungan dengan apa substansi kritik dan siapa pengkritiknya. Soal siapa yang menjadi sasaran kritik kiranya cukup jelas: SBY. Mengenai siapa pengkritiknya tak selalu jelas.

Pidato 2004 seakan hendak meredam kritik bahwa SBY gagal mewujudkan "obsesi 100 hari pertama pemerintahannya". Meskipun tidak pernah jelas apa landasannya, setiap presiden akan selalu disorot khusus pada 100 hari pertamanya. SBY tegas menjawab "tidak mungkin diselesaikan hanya dalam 100 hari" sebab "tidak semudah membalik telapak tangan". Pengkritik bisa siapa saja, terutama politisi pesaing, mahasiswa, pengamat politik. Efektifkah strategi SBY ini tidak terlalu penting. Akan tetapi, SBY berusaha menunjukkan sikapnya sebagai pemimpin. Sikap ini menjadi sarana untuk meredam kritik.

Substansi kritik pada 2005 adalah SBY jangan menepuk dada terlalu cepat atas naiknya angka pertumbuhan ekonomi sebab bisa saja terjadi fluktuasi mengingat ketidakpastian situasi global. Justru kondisi ini dimanfaatkan SBY dengan cerdas. Walaupun yakin bahwa "pertumbuhan ini cukup membesarkan hati", SBY sadar bahwa sewaktu-waktu lingkungan perekonomian global "terus berubah secara cepat" dan "cenderung tidak ramah". Dengan ini SBY diuntungkan sebab ia bisa dengan cerdas menjadikan kondisi global sebagai "jurus berkelit di saat sulit". SBY, misalnya, dapat mengatakan bahwa nilai tukar rupiah jatuh bukan karena ketidakmampuan pemerintah, melainkan karena dampak krisis global, meningkatnya tingkat suku bunga internasional, dan melonjaknya harga minyak mentah dunia. Ini sebuah taktik mengalihkan perhatian, bahkan "melempar tanggung jawab" (cf. Seidel, 1985; cf. Wildgen, 1994).

Sebagian kritik yang mengemuka pada 2006 adalah tingginya harga obat serta kurangnya perhatian pemerintah dalam hal layanan kesehatan kepada publik. Pemerintah menjawabnya dengan dua kali menurunkan harga obat serta menghidupkan kembali Posyandu yang sejak awal Reformasi (1998) telah mati. Kondisi "sebelumnya" inilah yang menyelamatkan SBY dari hantaman kritik. Orang toh melihat bahwa dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya (Megawati), SBY lebih memberikan layanan kesehatan dengan bukti memberdayakan kembali Posyandu. Jadi, publik tidak fokus pada soal kualitas dan pemerataan pelayanan Posyandu, tetapi juga—atau justru lebih ke—kenyataan bahwa keadaan "saat ini" (SBY) masih lebih baik ketimbang masa-masa presiden sebelumnya (Megawati, Gus Dur, Habibie). Ini jurus "sekali tepuk, dua sasaran"; kegagalan masa lalu dapat menjadi berkah bagi rezim penguasa saat ini;

citra diri sukses dapat diciptakan di atas kegagalan orang lain (Jokinen, 2007; Edelman, 2008).

Pada pidato kenegaraan 2007, SBY meredam kritik berkenaan dengan minimnya pembangunan dan rehabilitasi gedung SD di seluruh pelosok. Adalah realitas faktual bahwa di mana-mana banyak gedung SD impres retak, rusak, kumuh, bahkan roboh. Bagi SBY, tentu hal ini bisa merontokkan citranya. Akan tetapi, rupanya ia cukup beruntung. SBY diuntungkan oleh perubahan struktur politik pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi (otonomi daerah). Lagi-lagi, jurus "berkelit di saat sulit" yang pernah sukses dikeluarkan saat 2005 sekarang bisa dengan cerdas dimainkan. SBY, misalnya, menyatakan bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), sementara pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi Sekolah Dasar, dalam alam otoda, menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah (gubernur, bupati, walikota). Maka, SBY tidak bisa dipersalahkan. Terbukti jurus ini cukup ampuh meredam kritik. Ini strategi "cuci tangan" dan pelemparan tanggung jawab (Seidel, 1985; cf. Sigelman, & Miller, 2003).

Sukses meredam kritik dengan jurus "berkelit di saat sulit" pada 2005 dan 2007 mendorong SBY untuk mengulangnya pada 2008 saat ia dikritik gagal memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran. SBY dengan cerdas menyatakan bahwa Pemerintah sudah memperbesar anggaran ke daerah dalam tahun 2009 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta mendukung program-program pengentasan kemiskinan dan penyerapan pengangguran. Selanjutnya, tugas pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Maka, jika di daerah masih terdapat banyak warga miskin dan pengangguran, itu jelas bukan salah pemerintah. Dalam alam otoda, sepenuhnya itu kesalahan pemerintah daerah. Apalagi, SBY sudah mengingatkan para pimpinan daerah agar "betul-betul memanfaatkan setiap rupiah dana untuk dialokasikan secara maksimal bagi kepentingan rakyat".

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik dua simpulan. *Pertama*, dengan perspektif analisis wacana kritis ada lima makna terselubung di balik teks pidato kenegaraan SBY kurun 2004—2008, yaitu: (1) menjawab tuntutan publik, (2) menggalang dukungan dari banyak kalangan, (3) membangun optimisme kepada rakyat, (4) mendongkrak citra diri di mata publik, dan (5) meredam kritik dari para lawan/pesaing politis. *Kedua*, makna terselubung memojokkan lawan politis tidak ditemukan dalam teks pidato kenegaraan SBY.

Berdasarkan simpulan kedua, dapat dikatakan bahwa pernyataan SBY memiliki nilai kesantunan. Jika kajian ini hendak dilanjutkan, kesantunan bahasa pidato Presiden SBY dapat dijadikan fokus telaah. Kajian seperti ini, misalnya, dispesifikkan ke dalam prinsip kooperatif, prinsip kesantunan, dan parameter pragmatik (Yule, 1996). Data, tentu saja, harus diperluas, misalnya ke pernyataan-pernyataan kurun setelah 2008.

### Daftar Rujukan

- Anderson, B.R.O'G. 1990. *Language and Power: Exploring Political Culture of Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Bungin, B. 2001. "Content Analysis dan Focus Group Discussion dalam Penelitian Sosial". Dlm. B. Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Duffy, M.E. 2003. "Web of Hate: a Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups Online". <http://jci.sagepub.com/cgi/content/abstract/27/3/291>

- Edelman, M. 2008. "The Symbolic Uses of Politics". [www.press.uillinois.edu/books/catalog/72shy2en9780252012020.html](http://www.press.uillinois.edu/books/catalog/72shy2en9780252012020.html)
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Farrell, T.B. & T.G. Goodnight. 2008. "Accidental Rhetoric: The Root Metaphors of Three Mile Island". [www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a911931310](http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a911931310), akses 8 Februari 2009
- Hooker, V.M. 1996. "Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia". Hal. 56—76 dlm. Y. Latif & I.S. Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Jokinen, A. 2007. "A Discourse in Defence of the Earl of Leicester". [www.luminarium.org/editions/sidneyleicester.htm](http://www.luminarium.org/editions/sidneyleicester.htm), akses 8 Februari 2009
- Jupriono, D. 2009. "Wacana Humor Gus Dur: Perspektif Tindak Tutur". <http://sastra-bahasa.blogspot.com>, akses 8 September 2009.
- Jupriono, D. 2004. "Analisis Wacana Kritis Pidato Kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Perspektif Komunikasi politik". Tesis S2 Magister Ilmu Komunikasi. Program Pascasarjana, Unitomo.
- Jupriono, D., Sudarwati, Anik C. Rahayu, Ambar Andayani. 2009. "Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis". *Laporan Penelitian Dosen Muda*, Dana DP2M, Tahun Anggaran 2009. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas.
- Jupriono, D. 2010. "Politik Pencitraan Presiden SBY Melalui Bentuk Kalimat: Kajian Linguistik Kritis". Naskah Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Nasional Tahun 2010, DP2M, Ditjen Dikti, Depdiknas.
- Mulyana, D. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda.
- Nimmo, D. 1993. *Komunikasi Politik*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Seidel, G. 1985. "Political Discourse Analysis". Hal. 43—55 dlm. van Dijk (ed.), *Handbook of Discourse Analysis Vol 4*. London: Academic Pres.
- Sigelman, L. & L. Miller. 2003. "Understanding Presidential Rhetoric". <http://crx.sagepub.com/cgi/content/abstract/5/1/25>
- Stewart, W.H. 2005. "Metaphors, Models, and the Development of Federal Theory". [http://publius.oxfordjournals.org/cgi/pdf\\_extract/12/2/5](http://publius.oxfordjournals.org/cgi/pdf_extract/12/2/5)
- van Dijk, T.A. 1998. "Critical Discourse Analysis". <http://www.hum.uva.nl/teun/cda.htm>
- van Dijk, T.A. 2002. "From Text Grammar to Critical Discourse Analysis". <http://cf.hum.uva.nl/teun/belie-e.htm>
- Wildgen, J.K. 1994. "The Subversion of Argument: Lessons from the Demagogic Rhetoric of David Duke." *Political Communication* 11: 217-31. [www.informaworld.com/index/912224546.pdf](http://www.informaworld.com/index/912224546.pdf)
- Yule, G. 1996. *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.